

RINGKASAN LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN ANGGARAN 2024

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua,

Om Swastyastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Saudara-saudaraku warga Kabupaten Gunungkidul yang saya cintai dan banggakan.

Alhamdulillah puji syukur kami panjatkan kehadhirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kami masih berkesempatan untuk menyampaikan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD) Tahun 2024. Penyampaian RLPPD merupakan perwujudan prinsip transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah kepada Warga Masyarakat Kabupaten Gunungkidul. Sebagaimana ketentuan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban kepada DPRD, Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, dan RLPPD kepada Masyarakat paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran

Penyampaian RLPPD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, sesuai ketentuan Peraturan Menter Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, selanjutnya kami sajikan sebagai berikut:

A. CAPAIAN KINERJA MAKRO 1. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Sejak tahun 1990, UNDP mempublikasikan IPM secara berkala dalam laporan tahunan Human Development Report (HDI), Dimensi dasar IPM meliputi Umur panjang dan hidup sehat, Pengetahuan, Standar hidup layak.

Berdasarkan data BPS dalam Kabupaten Gunungkidul Dalam Angka 2024, dimensi dasar umur panjang dan hidup sehat dilihat dari data angka harapan hidup. Dimensi dasar pengetahuan dilihat dari angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah, dan standar hidup layak diketahui melalui data pengeluaran riil per kapita yang disesuaikan tahun 2024. Berdasarkan data capaian dimensi dasar dimaksud, capaian IPM Gunungkidul tahun 2024 adalah sebesar 72.14.

Tabel Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Gunungkidul

Angka Harapan Hidup	Harapan Lama Sekolah	Rata-Rata Lama Sekolah	Pengeluaran Riil Per Kapita yang disesuaikan	Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
74,91 tahun	13,40%	7,35 tahun	Rp. 10.630.000,-	72,14

Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024

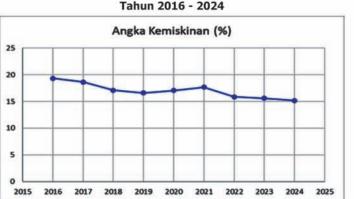
Capaian IPM Tahun 2024 dimaksud meningkat 0,68 poin dibandingkan kondisi tahun 2023 yang tercatat 71,46. Capaian IPM dimaksud telah masuk dalam kategori IPM Tinggi, namun demikian perlu kerja keras yang harus terus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, pemangku kepentingan, dan seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar memiliki daya saing yang tinggi, guna mewujudkan Masyarakat Adil, Makmur, Lestari, dan Berkeadaban,

Parameter peningkatan kesejahteraan secara riil dapat dilihat dari tingkat pendapatan masyarakat. Permasalahan mendasar dalam medata pendapatan rumah tangga dipengaruhi budaya kita yang kurang terbuka atau bahkan tidak bersedia memberikan informasi riil dan terinci. Hal ini berdampak terhadap akurasi data pendapatan rumah tangga yang diperoleh. Salah satu pendekatan BPS dalam mengukur tingkat kesejahteraan, melalui penelitian penghasilan rumah tangga dengan pendekatan konsumsi (consumption approach), sehingga diperoleh indikator kesejahteraan penduduk dari data konsumsi rumah tangga, yaitu penduduk miskin, distribusi pendapatan, dan pola konsumsi rumah tangga.

Secara umum penduduk miskin adalah penduduk yang pendapatannya (proksi pengeluaran) lebih kecil dari kebutuhan hidup layak diwilayahnya. Kebutuhan hidup layak diteriemahkan dari nilai rupiah yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan makan setara dengan 2.100 kilo kalori/orang/hari, sebagai nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan dan non makanan esensial lainnya. Penduduk miskin menurut definisi BPS merupakan penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah angka kebutuhan

Persentase penduduk miskin Kabupaten Gunungkidul dalam kurun 8 tahun terakhir yakni dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2024, menunjukkan trend yang terus menurun. Meskipun mpat terjadi anomali yang terjadi pada tahun 2020-2021 sebagai dampak dari pander Covid-19, tren penurunan angka kemiskinan kembali dapat dicapai dan dipertahankan dalam dua tahun terakhir, seperti tampak dalam grafik yang kami sajikan sebagai berikut:

Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Gunungkidul



Sumber : BPS Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan data BPS tersebut terlihat bahwa persentase penduduk miskin Gunungkidul senantiasa mengalami penurunan secara konsisten. Tahun 2016 jumlah penduduk miskin tercatat 19,34%, tahun 2017 sebesar 18,65%, tahun 2018 sebesar 17,12%, dan tahun 2019 turun menjadi 16,61%. Kondisi diluar kemampuan kendali terjadi di tahun 2020-2021 telah memaksa untuk mengubah kebijakan, strategi, dan bahkan target yang telah dicanangkan. Bencana non alam pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan angka kemiskinan mengalami perlambatan. Namun kita patut bersyukur dengan dukungan semua pihak kemiskinan tahun 2022 kembali dapat ditekan ke angka 15.86%, pada tahun 2023 turun ke angka 15,60%, dan dapat ditekan lagi di angka 15,18% pada tahun 2024.

Penurunan angka kemiskinan terus senantiasa diupayakan, antara lain dalam bentuk kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul melalui penetapan Peraturan Bupati Nomor 100 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Tahun 2022-2026. Tujuan yang ditetapkan mencakup 1) Terwujudnya pemenuhan hak dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin (dalam pemenuhan 3 layanan dasar: pendidikan, kesehatan, infrastruktur); 2) Terwujudnya peningkatan ekonomi & kesejahteraan masyarakat miskin; dan 3) Terwujudnya keselarasan kerja, penguatan kelembagaan & sumber daya manusia tim penanggulangan kemiskinan.

3. Angka Pengangguran Berdasarkan data kependudukan, diketahui bahwa Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 masih berada pada periode emas secara demografi. Jumlah penduduk kategori usia produktif (15 tahun sampai dengan 64 tahun) jumlahnya 520.847 jiwa atau 67,04%. Jumlah ini jauh lebih banyak dibanding penduduk kategori usia non produktif yang tercatat 256.079 jiwa atau 32,96% dari total jumlah penduduk Gunungkidul Tahun 2024 yang tercatat sebanyak 776.926

Salah satu indikator penting dalam konteks ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan perbandingan antara penduduk angkatan kerja dengan penduduk usia kerja. TPAK memberi gambaran tentang penduduk yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari. Dengan melihat indikator TPAK dapat dilihat besarnya jumlah penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi disuatu wilayah serta dapat menunjukkan besaran relatif dari pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk produksi barang-barang dan jasa dalam suatu perekonomian wilayah.

Tingkat Partisipasi Angkatan Keria (TPAK) DIY

Kabupaten/ Kota	TPAK						
	2020	2021	2022	2023	2024		
Kulon Progo	77.88	76,72	78,83	75,75	78,57		
Bantul	74.45	71,64	74,39	75,06	74,87		
Gunungkidul	65.30	75,99	74,07	76,66	76,87		
Sleman	70.51	73,05	68,12	71,18	73,27		
Yogyakarta	68.62	71,86	72,48	73,20	70,56		

Sumber: Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2024

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Kabupaten Gunungkidul pada tahun 2024 tercatat sebesar 76,87%. Hal ini dapat diartikan bahwa dari setiap 100 penduduk usia produktif di Gunungkidul, terdapat hampir 77 penduduk yang berstatus sebagai angkatan kerja. Namun penurunan maupun peningkatan TPAK belum secara langsung menggambarkan kondisi baik buruknya ketenagakerjaan.

Indikator kedua yang digunakan untuk melihat permasalahan ketenagakerjaan adalah menggunakan data Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) guna mengukur pengangguran. Dengan melihat capaian TPT, dapat diketahui indikasi tentang penduduk usia keria yang masuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase jumlah penganggur/pencari kerja terhadap jumlah angkatan kerja. Naiknya TPT dapat berarti adanya penuunan daya serap tenaga kerja atau juga dapat berarti bahwa kecepatan laju kesempatan kerja tidak dapat mengimbangi kecepatan laju pertumbuhan angkatan kerja.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) DIY Tahun 2024



Sumber : Data BPS, DIY Dalam Angka Tahun 2024

Angka TPT tertinggi di DIY terjadi di Kota Yogyakarta sebesar 5,80%, diikuti Kabupaten Sleman 4,13%, Kabupaten Bantul 3,62%, dan Kabupaten Gunungkidul 2,16%, yang diikuti Kabupaten Kulonprogo 2.01%. Modal sosial berupa etos kerja yang tinggi dan daya serap lapangan kerja sesuai dengan keterampilan yang dimiliki oleh masyarakat Gunungkidul, terlebih pada sektor non formal turut mendukung rendahnya TPT di Kabupaten Gunungkidul.

4. Pertumbuhan Ekonomi

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu pencerminan kemajuan perekonomian suatu daerah, yang didefinisikan sebagai keseluruhan nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan dalam kurun waktu satu tahun. PDRB Gunungkidul Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Tahun 2024 Rp26.705,33 miliar atau meningkat dari Tahun 2023 yang tercatat

Kontribusi terbesar PDRB 2024 diberikan oleh kelompok sektor pertanian, kehutanan & perikanan yakni sebesar 24.02%, diikuti secara berturut-turut 7 besar kontributor PDRB yakni sektor konstruksi (9.21%), sektor informasi & komunikasi serta sektor perdagangan besar & eceran (8,82%), administrasi pemerintahan, pertahanan & jaminan (8,14%), industri pengolahan (8,38%), & sektor penyediaan akomodasi dan makan minum (6,63%).

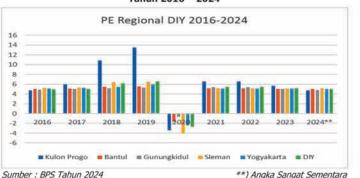
Adapun PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) 2010 Tahun 2024 sebesar Rp16.506,42 miliar, atau naik dibanding capaian Tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp15.749,22 miliar. Data PDRB ADHK yang digunakan untuk menghitung laju pertumbuhan ekonomi bertujuan mengurangi pengaruh laju inflasi. Dengan data dimaksud, maka diketahui laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 adalah 4,81%. Laju pertumbuhan ekonomi 5



Sumber: Data BPS, Gunungkidul Dalam Angka Tahun 2024

Diagram tersebut menunjukkan bahwa perekonomian wilayah Gunungkidul telah mampu bangkit dari kondisi kontraksi ekonomi dampak bencana non alam pandemi Covid-19 yang melanda sejak awal tahun 2020 dan masih dirasakan dampaknya hingga saat ini. Dari data tersebut juga menunjukkan dahsyatnya dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi perekonomian wilayah. Dari sisi ekonomi, Kabupaten Gunungkidul dengan karakteristik yang dimiliki menjadi wilayah paling adaptif terhadap dampak pandemi Covid-19 khususnya di wilayah DIY. Adapun gambaran secara regional laju pertumbuhan dalam kurun waktu 8 (delapan) tahun terakhir di wilayah DIY, dapat dilihat dari tabel berikut :

Pertumbuhan PDRB ADHK 2010 di DIY Tahun 2016 - 2024



Pendapatan perkapita dapat diartikan sebagai pendapatan penduduk disuatu wilayah pada periode/tahun tertentu. Terdapat dua cara mengetahui pendapatan perkapita, yakni perhitungan berdasarkan harga berlaku yang disebut pendapatan perkapita nominal tanpa memperhitungkan tingkat kenaikan harga atau laju inflasi. Kedua perhitungan berdasarkan harga konstan yang disebut pendapatan perkapita riil dengan memperhitungkan laju inflasi.

Pada Tahun 2024 berdasarkan data BPS Kabupaten Gunungkidul, PDRB perkapita atas dasar harga berlaku atau pendapatan perkapita nominal Kabupaten Gunungkidul adalah sebesar Rp.35.504.000,- meningkat dari kondisi tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp.33.260.000,- atau meningkat 6,75%., yang mengindikasikan bahwa secara ekonomi, masyarakat telah dapat berdaptasi dengan kondisi new normal dampak bencana non alam

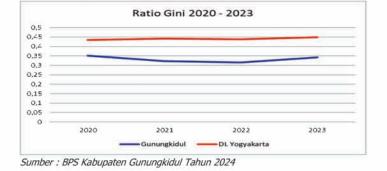
Pendapatan Perkapita Masyarakat Kabupaten Gunungkidul



6. Ketimpangan Pendapatan Salah satu aspek kemiskinan yang perlu diperhatikan sebagai ukuran kemiskinan relatif adalah distribusi pendapatan. Pengukuran distribusi pendapatan dilakukan menggunakan data pengeluaran. Ukuran yang menggambarkan ketidakmerataan pendapatan antara lain adalah Gini Ratio, Perubahan Gini Ratio merupakan indikasi adanya perubahan distribusi pengeluaran penduduk. Nilai Gini Ratio berkisar antara 0 dan 1, jika mendekati nol maka tingkat pendapatan semakin merata. Gini Ratio dibagi tiga: <0,3 kategori rendah, 0,3 - 0,5 ategori moderat, dan >0,5 masuk kategori ketimpangan tinggi (Oshima)

Data gini ratio 2024 pada saat tulisan ini dibuat belum dirilis oleh BPS DIY sebagai lembaga yang berwenang. Berdasarkan data BPS pada tahun 2023 nilai gini ratio Kabupaten Gunungkidul tercatat 0,343 (ketimpangan moderat). Data ini menunjukkan adanya peningkatan dari tahun 2022 yang tercatat 0,316. Secara regional di DIY, nilai gini ratio abupaten Gunungkidul berada di bawah angka rata-rata DIY yang mencapai 0,449, dengan kata lain ketimpangan distribusi pendapatan di Gunungkidul lebih merata dibandingkan

Grafik Ketimpangan Pendapatan DIY



B. RINGKASAN CAPAIAN KINERJA URUSAN PELAYANAN DASAR

Prioritas pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, merupakan amanat Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Keterbatasan keuangan daerah dan adanya belanja mengikat seperti dukungan Pemilu 2024, Pembiayaan Pilkada 2024, dan persiapan penyelenggaraan PORDA sangat berpengaruh terhadap cakupan pemenuhan pelayanan dasar. Di samping itu keterbatasan sumber daya manusia juga masih menjadi kendala dalam penerapan pelayanan dasar. Namun hal tersebut tidak menyurutkan tekad Pemkab Gunungkidul, untuk menerapkan SPM semaksimal mungkin sesuai kemampuan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki.

Pada Tahun 2024, pelaksanaan pelayanan dasar bidang pendidikan sebagaimana amanat Permendagri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan SPM yang 3 jenis pelayanan dasar, adalah sebagai berikut: Pendidikan Anak Usia Dini.

SPM Pendidikan Anak Usia Dini, indikatornya adalah Jumlah Warga Negara Usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD. Pada Tahun 2024, jumlah anak usia 5-6 tahun di Kabupaten Gunungkidul berjumlah 18.671 anak, sementara yang sudah tamat atau sedang belajar pada satuan pendidikan PAUD berjumlah 16.800 anak, atau capaian SPM PAUD 2024 sebesar 89,98%. b. Pendidikan Dasar:

SPM Pendidikan Dasar memiliki indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar (SD/Mi dan SMP/MTs). Berdasarkan data Tahun 2024, Warga Negara Usia 7-15 tahun terdapat sebanyak 89.372 jiwa. Dari jumlah penduduk usia pendidikan dasar tersebut, sebanyak 86.132 jiwa sudah tamat atau sedang menempuh pendidikan dasar baik SD/MI dan SMP/MTs. Sehingga capaian SPM Pendidikan Dasar sebesar 96,37%.

Pendidikan Kesetaraan. Indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara Usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar atau menengah yang perpartisipasi dalam pendidikan kesataraan. Pada Tahun 2024, jumlah penduduk usia 7-18 tahun sasaran pendidikan kesetaraan sebanyak 2.564 orang, sedangkan jumlah partisipasinya tercatat 673 orang atau sebesar 26.25%. Hal ini tidak lepas dari sulitnya melakukan pendataan warga yang telah mengikuti pendidikan kesetaraan di luar program Dinas Pendidikan dan/atau pendidikan kesetaraan yang telah dilaksanakan pada waktu lampau, dan masih relati rendahnya kesadaran warga untuk mengikuti pendidikan kesetaraan.

Urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, didukung 30 Unit Puskesmas, 1 Laboratorium Kesehatan dan Lingkungan, RSUD Saptosari, dan RSUD Wonosari, Penerapan SPM Bidang Kesehatan untuk pemerintah kabupaten meliputi 12 jenis: a. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil; Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan

kesehatan, pada Tahun 2024 terdapat Ibu Hamil sebanyak 5.517 orang dan yang telah mendapatkan pelayanan sebanyak 5.127 orang, atau mencapai 92,93%. b. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin: Pada Tahun 2024, jumlah ibu bersalin sebanyak 5.517 orang dan semuanya telah

mendapatkan layanan kesehatan. Sehingga capaian Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 100%. c. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir; Indikator pencapaian ditetapkan berupa Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan. Jumlah bayi baru lahir pada Tahun 2024 sebanyak 5,500 anak, dan

4.762 anak diantaranya telah mendapatkan layanan kesehatan, atau capaian pelayanan sebesar 86,58%. d. Pelayanan kesehatan balita;

Dengan jumlah Balita pada Tahun 2024 sebanyak 34.686 anak dan yang telah mendapatkan pelayanan kesehatan sebanyak 30.793 anak. Sehingga capaian kinerja Balita yang mendapatkan layanan kesehatan sebesar 88,78%.

e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar: Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan pada Tahun 2024 sebanyak 100%, dengan rincian jumlah warga negara usia pendidikan dasar sebanyak 81.395 orang dan seluruhnya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar.

Pelayanan kesehatan pada usia produktif.

Pada Tahun 2024, Jumlah Warga Negara usia produktif yang harus mendapatkan pelayanan sebanyak 466.051 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 249.032 orang. Sehingga Jumlah Warga usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan tercapai sebesar 53,43%. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut;

Jumlah Warga Negara usia lanjut Tahun 2024 yang harus dilayanani mencapai 81.633 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 63,239 orang. Sehingga Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan

Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan,

pada Tahun 2024 tercapai sebesar 35,79%. Yakni dari 32.008 orang penderita hipertensi, yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar sebanyak 11.456 orang. Pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus; Jumlah Warga Negara penderita diabetes melitus yang mendapatkan layanan kesehatan, pada Tahun 2024 tercapai sebesar 47,06%. Dengan rincian dari 10.329 orang penderita diabetes melitus, yang telah mendapatkan layanan kesehatan sesuai standar

sebanyak 4.861 orang. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;

Pada tahun 2024, tercatat sebanyak 1.652 orang mengalami gangguan jiwa berat dan 1.258 diantaranya telah mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar. Sehingga pencapaian SPM pelayanan terhadap Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatannya terealisasi sebesar 76,15%. k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis:

Di wilayah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 tercatat ada 6.948 warga terduga tuberkulosis. Warga Negara terduga tuberkulosis yang mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 5.135 orang, atau dengan capaian kinerja sebesar 73,91%. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya

tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus/HIV). Jumlah Warga Negara dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV) pada Tahun 2024 sebanyak 6.644 orang dan yang telah mendapatkan layanan kesehatan sebanyak 6.141 orang. Sehingga pemenuhan SPM nya

Berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan dasar bidang kesehatan, pada tanggal 8 Agustus 2024, Kabupaten Gunungkidul mendapatkan apresiasi Pemerintah Pusat terhadap komitmen penerapan universal health coverage/UHC, karena telah melampaui cakupan kepesertaan minimal 95% JKN (jaminan kesehatan nasional) terhadap total jumlah penduduk dan keberhasilan mengintegrasikan program Jamkesda ke dalam program JKN. UHC merupakan sistem penjaminan kesehatan yang memastikan setiap warga memiliki akses yang adil terhadap pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. UHC mengandung 2 elemen, yakni akses pelayanan kesehatan yang adil dan bermutu bagi setiap warga, serta perlindungan risiko finansial terhadap warga dalam memperoleh pelayanan kesehatan. Terhadap komitmen dimaksud, Kabupaten Gunungkidul memperoleh penghargaan cakupan kepesertaan minimal 95% peserta JKN dari total jumlah penduduk, serta pengintegrasikan program Jamkesda ke dalam program JKN.

3. Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang pekerjaan umum dan penataan ruang di

Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman

Kabupaten Gunungkidul dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman (DPUPRKP) dan Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (DPTR). Jenis SPM Penyediaan Kebutuhan pokok air minum sehari-hari;

Dalam upaya penerapan SPM ini, DPUPRKP Kabupaten Gunungkidul melaksanakan Program Penyehatan Lingkungan Permukiman dengan kegiatan Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan Penyediaan Sarana dan Prasarana SPAM, Drainase dan Air Limbah. Berdasarkan data Tahun 2024 tercatat sebanyak 262.751 rumah tangga, dan yang sudah terlayani kebutuhan pokok air minumnya mencapai 238.124 rumah tangga, atau capaian SPM ini mencapai 90,63%.

Penyediaan Pelayanan Pengolahan air limbah Domestik. Penerapan dan pemenuhan SPM Pengolahan air limbah Domestik Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024, terealisasi 92,11%. Dengan jumlah rumah yang telah memperoleh akses layanan pengolahan air limbah domestik sebanyak 232.823 rumah tangga dari total sebanyak 252.770 rumah yang ada.

Urusan Wajib di Bidang Perumahan dan Kawasan Pemukiman di Kabupaten Gunungkidul

dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman

(DPUPRKP). Adapun jenis pelayanan dasarnya ditetapkan oleh Pemerintah sebagai berikut Penyediaan dan rehabiitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana;

Dalam pemenuhan SPM penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana, sepanjang tahun 2024 di Kabupaten Gunungkidul tidak terdapat warga terdampak bencana yang memerlukan penyediaan atau rehabilitasi rumah. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi prograr

Pada Tahun 2024, di wilayah Kabupaten Gunungkidul tidak terdapat program pemerintah yang menggunakan mekanisme dan/atau mengakibatkan relokasi rumah warga masyarakat. Sehingga sepanjang tahun tidak terdapat warga masyarakat pemerlu pelayanan dasar penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi warga yang terkena relokasi program

5. Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Pelindungan Masyarakat

Di Gunungkidul, urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yakni sub urusan bencana dan kebakaran. Adapun jenis SPM bidang ini meliputi: a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum;

Dengan indikator pencapaian berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada, pada Tahun 2024 capaian pelayanannya terealisasi sebesar 100%. Berdasarkan data SatpolPP terdapat 55 orang warga terdampak operasi penegakan hukum perda/perkada dan semuanya telah memperoleh pelayanan sesuai standar.

Pelayanan informasi rawan bencana; Pada Tahun 2024, di wilayah Gunungkidul tercatat 774.441 jiwa warga yang tersebar di 18 kapanewon yang berhak menerima layanan informasi rawan bencana. Informasi rawan bencana disampaikan secara berjenjang melalui jejaring Desa Tangguh Bencana (Destana) yang dibentuk sejak tahun 2012 sampai tahun 2024 terhadap seluruh kalurahan yang masuk kategori rawan bencana. Sehingga, pencapaian parameter pelayanan informasi rawan bencana dapat terealisasi 100%.

Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana: Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana sebagai indikator pencapaian terealisasi 100%. Yakni pelayanan dilakukan terhadap 487.216 jiwa warga yang berhak menerima layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana yang terintegrasi dalam program Destana, nelalui pelatihan terhadap 25.601 orang petugas/relawan. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;

Indikator Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, berdasarkan rekapitulasi laporan kejadian bencana yang ada di Pusat Pengendalian dan Operasi pada BPBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 sebanyak 12.001 warga terdampak bencana, dan semuanya telah mendapatkan layanan atau terealisasi 100%. e. Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

Dengan indikator capaian berupa Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan Evakuasi korban kebakaran, pada tahun 2024 terdapat 110 laporan keiadian kebakaran dan 91 keiadian dapat tertangani oleh petugas pemadam kebakaran atau capaian kinerja SPMnya terealisasi sebesar 83,74%.

Jenis SPM Bidang sosial yang meliputi 2 indikator kinerja kunci, yakni: Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar,

dan gelandangan pengemis di luar panti: Berdasarkan data pada Tahun 2024, jumlah warga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar panti yang seharusnya memperoleh bantuan sosial sebanyak 14.136 orang dan telah memperoleh rehabilitasi sosial dasar sebanyak 7.079 orang. Sehingga capaian rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, dan gelandangan pengemis di luar

panti terealisasi 63,1%. Perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana. SPM perlindungan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana, pada Tahun 2024 terealisasi sebesar 100%. Dengan rincian warga negara korban bencana yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan pasca bencana bagi korban bencana sebanyak 490 orang, dari total jumlah korban bencana sebanyak 490

C. EVALUASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN OPINI LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH TAHUN SEBELUMNYA

1. Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Hasil evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah terbaru, termuat dalam Keputusa Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Secara Nasional Tahun 2023 Berdasarkan LPPD Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2022. Kabupaten Gunungkidul memperoleh skor 3,1393 (2021: 2,64) dengan kinerja kategori sedang dan di peringkat 106 (2021: 109) dari total 415

Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.7-6646 Tahun 2023 yang ditandatangani pada tanggal 21 Desember 2023 tersebut, hanya terdapat 29 kabupaten di Indonesia yang mendapatkan status kinerja tinggi, kemudian 234 kabupaten dengan status kinerja sedang, 118 dengan status kinerja rendah, dan 33 dengan status kinerja kategori sangat rendah.

2. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Secara umum kebijakan pengelolaan keuangan daerah Kabupaten Gunungkidul telah dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan perundangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, bertanggung-jawab, dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat. Sehingga terhadap pengelolaan keuangan yang dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) telah mendapatkan opini WTP dari BPK RI. Sampai dengan Tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul telah memperoleh penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas capaian opini WTP selama 9 tahun berturut-turut.

Terakhir terhadap LKPD Tahun 2023, berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK Nomor 10A/LHP/XVIII.YOG/04/2024 tertanggal 3 April 2024, disampaikan opini bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tanggal 31 Desember 2023, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

D. REALISASI PENERIMAAN DAN PENGELUARAN ANGGARAN DAERAH

Dalam rangka optimalisasi potensi pendapatan daerah, Pemerintah Kabupaten Gunungkidul menerapkan arah kebijakan, melalui a) Peningkatan kecepatan pelayanan dan kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah; b) Melakukan inovasi dan terobosan dalam optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah (Intensifikasi) dan mengupayaka sumber Pendapatan baru (Ekstensifikasi); c) Memperbaiki dan memperluas basis data obyek dan subjek pajak/retribusi daerah; d) Inventarisasi, pemetaan, dan peningkatan kualitas data dasar seluruh potensi sumber-sumber pendapatan daerah; e) Peningkatan kerjasama semua stakeholders dalam pencapaian, peningkatan pajak daerah; f) Penyiapan sarana prasarana retribusi pariwisata per lokasi sesuai tindak lanjut omnibus perda; dan g) Optimalisasi pemanfaatan kekayaan daerah (penyewaan aset pemda seperti tanah, gedung dan Pendapatan Daerah dalam APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 (anaudited) dari

rencana sebesar Rp2.121.678.831.452,00 dengan realisasi sebesar Rp2.114.096.687. 194,18 atau terealisasi sebesar 99,64%. Adapun komponen penyusunnya meliputi : a) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri dari Pajak, Retribusi, Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan, dan Lain-lain PAD yang Sah, rencana ditetapkan sebesar Rp290.925.625.113,00 terealisasi Rp301.193.377.089,18 atau 103,53%, b) Pendapatan transfer yang terdiri dari pendapatan transfer pemerintah pusat (dana perimbangan dana alokasi umum, dana alokasi khusus fisik dan non fisik, transfer dana desa, dan insentif fiskal), serta transfer antar daerah, direncanakan sebesar Rp1.830.153.206.339,00 terealisasi sebesar Rp1.812.202.227.483,00 atau 99,02%, c) Lain-Lain Pendapatan yang Sah yang terdiri dari Pendapatan Hibah, dan lain-lain pendapatan sesuai ketentuan peraturar perundangan, direncanakan Rp600.000.000,00 terealisasi Rp701.082.622,00 atau 116,85%.

Belanja daerah dalam APBD Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024 secara umum

diarahkan untuk: a) Belanja operasi daerah memprioritaskan terlebih dahulu pos belanja yang bersifat wajib dan belanja mengikat; b) Belanja operasi pada setiap PD (belanja pegawai/belanja barang dan jasa) digunakan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pelaksanaan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggungjawabnya; c) Belanja daerah berupa subsidi digunakan agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh BUMN, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga dapat terjangkau Masyarakat; d) Belanja daerah berupa hibah diberikan secara selektif, akuntabel, transparan dan berkeadilan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah yang telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, serta berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan; e) Belanja bantuan sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, kecuali dalam keadaa tertentu dapat berkelanjutan; f) Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria: mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan; digunakan dalam Kegiatan Pemerintahan Daerah; dan memenuhi batas minimal kapitalisasi asset; g) Belanja Bantuan Keuangan kepada kalurahan diarahkan sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan; h) Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya; dan i) Belanja yang bersumber dari dana perimbangan disesuaikan dengan peruntukannya

sesuai dengan ketentuan dan prioritas penggunaannya

Anggaran Belanja Daerah setelah perubahan anggaran Tahun 2024 (anaudited) dari rencana sebesar Rp2.180.273.925.997.76 terealisasi sebesar Rp2.092.349.589.955.00 atau telah mencapai 95,97%. Anggaran tersebut dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan 136 program, 259 kegiatan, dan 740 sub kegiatan yang tersebar pada 47 perangkat daerah. Adapun komponen penyusun belanja meliputi: a) Belanja Operasi yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial, dengan rencana sebesar Rp1.684.787.188.763,35 terealisasi Rp1.617,993.629.309,00 atau 96,04% b) Belanja Modal, dari anggaran sebesar Rp154.795.626.963.65 realisasinya Rp143.073.530.785,00 atau 92,43%, c) Belanja Tak Terduga, dari anggaran sebesar Rp9.420.726.095,76 terealisasi Rp296.252.086,00 atau 3,14%, d) Belanja Transfer dialokasikan sebesar Rp331.270.384.175,00 dan terealisasi sebesar Rp330.986.177.775,00 atau sebesar 99.91%.

ENDAH SUBEKTI KUNTARININGSIH, S.E., M.P.

Predikat Zona Hijau

3. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali pada tahun anggaran bersangkutan maupun sebelumnya serta memanfaatkan surplus anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan maupun investasi. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumya (SILPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Sedangkan pengeluaran pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Pembiayaan Daerah setelah perubahan anggaran Tahun 2024 (anaudited), dari rencana Rp58.595.094.545.76 dan terealisasi 100%, yang meliputi; a) penerimaan pembiayaan dari anggaran Rp76.595.094.545.76 yang terealisasi 100%, yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya; dan b) pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada BUMD dengan alokasi anggaran Rp.18.000.000.000,00 terealisasi

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul senantiasa berkomitmen meningkatkan kualitas pelayanan publik. Salah satu upaya dalam peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain melalui pengembangan inovasi pelayanan publik. Bukti komitmen mendorong inovasi salal satunya melalui program inovasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP), Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA), dan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN), Pada tahun 2024 terdapat sedikitnya 27 bentuk inovasi pelayanan publik yang terdiri dari 3

Bentuk inovasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP . Meningkatkan Kesiapsiagaan Masyarakat melalui Mitigasi Bencana Puting Beliung: Studi

Kasus Kalurahan Pacarejo Kapanewon Semanu; SIGRAK TANJAK (Sinau Gerakan Tari Gaya Jogjakarta) media pelestarian tari klasik bagi

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Disabilitas melalui Vitalisasi Puskesmas Peduli Inklusi Disabilitas "PUSPITA HANDAYANI" Dinas Kesehatan; 4. Penyebarluasan Informasi Upacara Adat Melalui Website dan Instagram Dinas Kebudayaan

(Kundha Kabudayan): 5. Penggunaan Aplikasi WA Untuk Pendaftaran Pasien Langsung ke Klinik Rawat Jalan RSUD Wonosari:

generasi muda dari Dinas Kebudayaan (Kundha Kabudayan);

6. Peningkatan Capaian Mutu Pelayanan Rawat Jalan melalui Implementasi Aplikasi Personal Health Record terintegrasi SIMRS di RSUD Saptosari;

7. "ANGGUN TERPADU" Antisipasi Gangguan Ketentraman, Ketertiban Melalui Patroli Terpadu di Kapanewon Patuk; 8. Pendampingan Alumni Pelatihan Kerja untuk Menjadi Wirausaha Mandiri (Piala Sang Jawara) dari Dinas Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Tenaga Kerja:

Menjaga Mutu Produksi Perikanan Tangkap Kabupaten Gunungkidul dari Kepala UPT Tempat Pelelangan Ikan Arghamina; 10. Digitalisasi Penatausahaan Dokumen Perencanaan dan Laporan Kinerja melalui Microsite s.id pada Dinas Perhubungan:

9. Optimalisasi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Higienis Sadeng Dalam Rangka

11. Percepatan Target Realisasi Anggaran Melalui Percepatan Pengelolaan Keuangan Pada Badan Kesatuan Bangsa Dan Polotik Kabupaten Gunungkidul dari Badan Kesatuan Bangsa

12. Peningkatan Kualitas Layanan Peminjaman Alun-Alun dan Ruangan serta Perlengkapannya (SPARTAN) dari Sekretariat Daerah;

13. Efektifitas Tata Cara Pergeseran APBD melalui Pembuatan SOP dan Peraturan Bupati dari Badan Keuangan dan Aset Daerah:

14. Pengembangan Kompetensi bagi Aparatur Sipil Negara Berbasis Blended Learning dari Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah; dan 15. Percepatan Layanan Kepemilikan Nomor Induk Berusaha dan Sertifikasi Halal bagi UMKM di

Bentuk inovasi provek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA):

1. "SINERGI CSR" (Sistem Informasi Kinerja Berbagi CSR) sinergisitas kegiatan tanggung jawab sosial dengan prioritas daerah pada Bappeda; 2. Penyusunan Regulasi Pengelolaan Bantuan Bencana Alam di Kabupaten Gunungkidul pada

3. "PENINGSET" Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Kebudayaan sebagai media pelestarian warisan budaya dari Dinas Kebudayaan (Kundha

4. "SINOMAN" Sistem Informasi Perencanaan Keistimewaan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gunungkidul dari Bappeda; 5. "SEKTI HANDAYANI" Sistem Keuangan Terintegrasi, Handal, dapat Dipahami, Meyakinkan

Normatif dan Informatif Prosedur Analitis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

menggunakan Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Gunungkidul dari BKAD: Pemberdayaan Masyarakat Upaya Pencegahan Stunting Melalui Integrasi Kebun Kolam Kandang (IBU KONDANG) di Kapanewon Nglipar; 7. Coaching dan Mentoring Aparatur Kalurahan Dalam Verifikasi Dokumen Pertanggungjawaban

APBKal di Kapanewon Gedangsari

merupakan kelanjutan Pendayagunaan

Bebas dari Korupsi dan Reformasi

8. Ki Pandu Kunti Dewonoto Klinik Pelayanan Terpadu Konsultasi Informasi dan Administrasi di Kapanewon atau Melalui on line dari Kapanewon Semin. Bentuk inovasi proyek perubahan Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) "PATRIOT TANI" Padukan Tekad, Raih Prestasi, Produksi dan Nilai Tambah Hasil Pertanjan

Guna Mendorong Kreativitas Generasi Milenial untuk Berkarya dan Berwirausaha pada Sektor Pertanian di Kabupaten Gunungkidul; "GERDU KITA" (Gerakan Peduli Penyakit Antraks dan Lainnya); . Upgrading Aplikasi Pelayanan Informasi Kepegawaian (APIK Linuwih): Integrasi Data dan

Layanan Kepegawaian di Kabupaten Gunungkidul; dan

4. "GEMPUR STUNTING" Gerakan Pemberdayaan Pemuda untuk Menurunkan Stunting di Kabupaten Gunungkidul Di samping itu sepanjang Tahun 2024, dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pembangunan yang telah dilaksanakan di Kabupaten Gunungkidul, mendapatkan apresiasi/ penghargaan yang berasal dari berbagai lembaga/institusi baik pemerintah maupun non pemerintah. Adapun bentuk apresiasi/ penghargaan Tahun 2024, dapat dilihat dalam tabel sebagai

No	Nama Penghargaan/ Asal Penghargaan	Institusi	Kategori Penghargaan	Keterangan	
1	Kepatuhan Terbaik Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut	BPJS Kesehatan	Piagam Penghargaan RSUD Wonosari dengan Kepatuhan Terbaik Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut	Tanggal: 19 Juni 2024	
2	Universal Health Coverage (UHC) Awards	BPJS Kesehatan	Cakupan kepesertaan minimal 95% JKN terhadap total penduduk dan pengintegrasian program Jamkesda ke dalam program JKN	Tanggal: 14 Maret 2023	
3	Membangun Sinergitas atas Dukungan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dengan Memberikan Bantuan Pelayanan Kesehatan dan Menjadi Rumah Sakit	n dalam Tugas dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Mausia Kanan Hukum dan Hak Asasi Mausia Asasi Mausia Direktur KSUD Wonosan yang telah Membangun Sinergitas atas Dukungan dalam Menjalankan Tugas dan Fungsi Pemasyarakatan dengan Memberikan Bantuan Pelayanan Kesehatan dan Menjadi Rumah Sakit Rujukan dalam Memfasilitasi Rusan Rawat Inan serta Memberikan		Tanggal: 4 Juli 2023	
4	Opini WTP Untuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023	BPK RI Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta	Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah opini audit yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan suatu entitas. Opini ini menyatakan bahwa laporan keuangan entitas tersebut disajikan secara wajar dalam semua hal yang material	Tanggal: 3 April 2024	
5	Kepatuhan Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan DIY	Dukcapil Gunungkidul dianugerahi penghargaan oleh Ombudsman Republik Indonesia atas penilaian kepatuhan terhadap pelayanan publik dengan nilai mengesankan, yakni 98,27, yang menempatkannya dalam Zona Hijau. Nilai tersebut menjadi tertinggi di Kabupaten Gunungkidul	Tanggal: 10 Desember 2024	
	Predikat WBBM	Kementrian	Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani		

dari predikat Wilayah Aparatur Negara Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang

Birokrasi (PANRB) Disdukcapil

(WBBM) merupakan kelanjutan dari predikat

telah didapatkan tahun 2020 pada

dalam evaluasi Pelavanan Publik oleh Ombudsman Penilaian Kepatuhan merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Ombudsman Republik Indonesia untuk Tanggal: 11 Pelayanan Publik memastikan bahwa instansi pemerintah dan Desember 2024 lembaga publik di Indonesia memberikan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dengan layanan yang sesuai dengan standar yang skor 97,78 Dalam rangka mempercepat terwujudnya pemerintah berkelas dunia yang diarahkan pada birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang kapabel, dan pelayanan publik Unit kerja pelayana berpredikat WILAYAH yang prima, telah dibangun Zona Integritas (ZI) pada unit kerja/satuan terutama yang dan Reformas KORUPSI langsung memberikan pelayanan kepada masyarakat. DPMPTSP berhasil meraih hasil sebagai unit kerja pelayanan berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Bhumandala Kineria Simpul Jaringan Tanggal: 4 9 RAJAT Bhumandala Informasi Geospasial November 2024 Pasar Tertib Ukur merupakan pasar tradisional maupun pasar modern yang mempergunakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Pasar Tertib Ukur Timbang, dan Alat Perlengkapan (UTTP) sesuai dengan ketentuan, yakni hertanda tera sah yang berlaku serta dipergunakan dan diperuntukan dengan benar Peringkat I Kategori Piagam Penghargaan Program Pengutamaan Lembaga Pemerintah Tanggal: 16 Bahasa Negara: Penggunaan Bahasa Penghargaan Program Indonesia pada Ruang Publik dan Surat di November 2024 Pengutamaan Bahasa Daerah Istimewa Yogyakarta 2022-2024 Terbaik I Penghargaan Tanggal: 28 Waiah Bahasa Oktober 2024 Penghargaan Program Kebudayaan, Riset, Bahasa Negara: Penggunaan Bahasa Tanggal: 15 Pengutamaan Bahasa dan Teknologi Indonesia pada Ruang Publik dan Surat d Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022-2024 Negara Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Anugerah Media Humas Komunikasi dan menerima penghargaan dalam Anugerah Media Humas Tahun 2024 Penghargaan dari Kemendagri atas Piagam Penghargaan artisipasi aktif dan keriasamanya dalam pelaksanaan Kegiatan Gerakan Nasional Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih Agustus 2024 Bendera Merah Putih Tahun 2024 dalam rangka menyemarakkan Tahun 2024 Hari Ulang Tahun ke-79 Kemerdekaan RI Tanggal: 21 Penganugerahan Badan Publik DIY sebagai Badan Publik Keterbukaan Informasi September Informatif dalam Penilaian money Badan Publik DIY 2024 eterbukaan Informasi Publik Piagam Penghargaan Tanggal: 26 Hari Bhakti Imigrasi Ke- kelas I TPI Hukum Keimigrasian di wilayah kerja Kantor Januari 2024 Prestasi Pengelolaan Imunisasi terbaik dalam Dinas Kesehatan Imunisasi yang terbaik dalam pencatatan dan Tanggal: 23 Jul pencatatan dan Pelaporan imunisasi melalui aplikasi yang Pelaporan imunisasi di ASIK pada tahun 2024 di DI Yogyakarta aplikasi ASIK 2024 Puskesmas Nglipar II mendapatkan sertifikat Sertifikat Penghargaar penghargaan konsistensi capaian KBK terbaik tahun 2023 sd 2024 bahwa Puskesmas Nolinar II selalu memberikan Penghargaan Gubernur DIY sebagai Juara 2 Kelembagaan Ekonomi Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2024 Penghargaan Gubernur DIY sebagai Juara 2 Tanggal: 13 Gapoktan Berprestasi Tingkat DIY 2024 Tingkat DIY 2024 Pangan DIY Penghargaan Gubernur DIY sebagai Juara 1 Petani Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2024 Penghargaan sebagai BPP Berprestasi Tingkat DIY Tahun 2024 Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2024 Tanggal: 25 Tenaga Kesehatan Teladan 2024 Penghargaan Tenaga Kesehatan Teladan Juni 2024 Puskesmas Tingkat Provinsi Tahun 2024 Gunungkidul Geopark Night Specta masuk dalam Karisma Event Nusantara program Karisma Event Kemenparektaf yaitu termasuk dalm 110 Nusantara Juni 2024 event unggulan yang telah dikurasi secara ketat dari 38 provinsi RSUD Wonosari memperoleh penghargaan Kepatuhan Terbaik Tanggal: 19 Kepatuhan Terbaik FKRTL dari BPJS FKRTL Juni 2024 Kesehatan Cabang Yogyakarta Posvandu Nyawiji Sawur di Kalurahan Posyandu Nyawi Sawur Kalurahan Sawahan di wilayah kerja UPT Puskesmas Tanggal: 21 Ponjong I terpilih untuk mewakili Kabupaten Sawahan menjadi Juni 2024 Juara 3 Posyandu Gunungkidul untuk mengikuti seleksi Yogyakarta posyandu inovasi di tingkat DIY Tahun 2024 Penghargaan tenaga kesehatan teladan kelompok profesi dokter gigi tingkat propinsi DI Yogyakarta meraih juara 3 dengan inovasi Tenaga Kesehatan Edukasi Konsultasi Kesehatan Gigi dan Mulut | Tanggal: 6 Mei Teladan Juara III propinsi DIY profesi melalui grup WA kelompok peer concelor 2024 Dokter Gigi SMP 2 Karangmojo oleh drg. Raden Roro Denis Herlina (Dokter Gigi Madya UPT Puskesmas Karangmojo II)

JOKO PARWOTO, S.E., M.M. WAKIL BUPATI GUNUNGKIDUL

Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan

Penghargaan yang didapatkan sebagaimana termuat dalam tabel di atas merupakan penghargaan yang didapat dari institusi/lembaga pemerintah. Secara keseluruhan, penyelenggaraan urusan pemerintahan di Kabupaten Gunungkidul sepanjang Tahun 2024 telah mendapatkan apresiasi lebih dari 59 penghargaan yang berasal dari berbagai lembaga/institusi baik pemerintah maupun non

Penghargaan-penghargaan ini hendaknya lebih memacu dan memotivasi segenap kita semua untuk tetap bersemangat dalam berkarya, mengabdi, dan tetap membangun sinergisme lintas

instansi/sektor untuk senantiasa meningkatkan kinerja. Harapannya, ini tidak dianggap sebagai hasil akhir yang mengendurkan motivasi untuk senantiasa berinivasi. Masa pandemi telah mengajarkan kepada kita bahwa pemanfaatan teknologi menjadi hal penting dan merupakan suatu keharusan agar dapat terus ikut berkompetisi pada era globalisasi saat ini. Bung Karno telah mengajarkan pada kita bahwa "Jika kita mempunyai keinginan yang kuat dari

dalam hati, maka seluruh alam semesta akan bahu-membahu mewujudkannya" Ucapan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepa seluruh komponen masyarakat yang telah memberikan kepercayaan dan kerja sama bahu membahu dengan Pemerintah Daerah, DPRD, serta Instansi Vertikal di daerah dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan/ pembangunan. Masukan, saran, koreksi, dan kritik yang bersifat membangun, sangat kami harapkan

dan dapat disampaikan melalui website: gunungkidulkab.go.id. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan meridhoi serta memberikan kekuatan bagi kita semua dalam upaya membangun Masyarakat Adil, Makmur, Lestari dan Berkeadaban, untuk mewujudkan GUNUNGKIDUL RAYA

Sekian dan terima kasih Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

